

KATA PENGANTAR

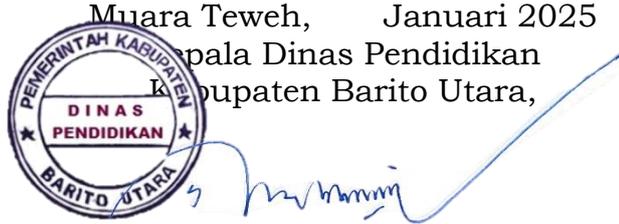
Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 belum sempurna sebagaimana yang diharapkan, namun dengan segala keterbatasan kiranya materi ini dapat memenuhi fungsinya.

Muara Teweh, Januari 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Utara,



SYAHMILUDIN A. SURAPATI, SP, M.SI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720309 200003 1 008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (RENSTRA) yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara merupakan suatu rencana yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara dengan Visi yaitu “Terwujudnya Percepatan Pembangunan SDM yang Berkualitas, Menguasai IPTEK Melalui Pendidikan yang Bermakna dengan dilandasi Iman dan Taqwa Menuju Masyarakat Barito Utara Yang Lestari dan Sejahtera” dan 4 (empat) pernyataan Misi serta beberapa tujuan dan sasaran yang harus dicapai.

Besarnya alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 sebesar Rp. **589,211,320,400.00,-** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. **405,645,975,600.00,-** dan Belanja Modal sebesar Rp. **183,565,344,800.00,-**

Dari alokasi anggaran tersebut realisasi keuangannya adalah sebesar Rp. **517,461,329,941.00,- (87.82%)** terdiri dari realisasi belanja Operasi sebesar Rp. **344,145,598,510.00,- (84,84%)** dan belanja Modal sebesar Rp. **173,315,731,431.00,- (94.42%)**.

Capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara yang diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dengan Indikator Kinerja, Target dan Realisasi:

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) target **84,00%** dengan realisasi sampai akhir Bulan Desember 2024 adalah **91.23%**,

2. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dasar dengan Indikator Kinerja, Target dan Realisasi:

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

Capaian APK (SD/MI/Paket A) target **90,00%** dengan realisasi sampai akhir Bulan Desember 2024 adalah **84.20%**.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

Capaian APK (SMP/MTs/Paket B) target **88,00%** dengan realisasi sampai akhir Bulan Desember 2024 adalah **69.59%**.

c. Angka Partisipasi Murni (APM) SD+MI+Paket A

Capaian APM (SD+MI+Paket A) target **76,00%** dengan realisasi sampai akhir Bulan Desember 2024 adalah **77.34%**.

d. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP+MTs+Paket B

Capaian APM (SMP+MTs+SMP Terbuka+Paket B) target **59,00%** dengan realisasi sampai akhir Bulan Desember 2024 adalah **57.76%**.

e. Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Capaian AL SD/MI dengan target **100%** dengan realisasi sampai akhir Bulan Desember 2024 adalah **100%**.

f. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Capaian AL SMP/MTs dengan target **100%** dengan realisasi sampai akhir Bulan Desember 2024 adalah **100 %**.

g. Rata – Rata Lama Sekolah

Capaian Rata – rata lama sekolah target **8,7** tahun dengan realisasi sampai akhir Bulan Desember 2024 adalah **8.7** tahun.

3. Meningkatnya akses pendidikan non formal

- Angka Melek Huruf

Angka melek huruf target **99.60** % dengan realisasi sampai akhir Bulan Desember 2024 adalah **99.53** %.

4. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

a. Guru yang bersertifikat S1

Guru yang bersertifikat target **68,00%** dengan realisasi sampai akhir Bulan Desember 2024 adalah **73.38%**.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
D. STRUKTUR ORGANISASI	4
E. ISU-ISU STRATEGIS	5
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. RENCANA STRATEGIS	8
1. Visi dan Misi	10
2. Tujuan dan Sasaran	12
3. Strategi dan Arah Kebijakan	13
4. Program	16
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PENETAPAN KINERJA	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
B. REALISASI ANGGARAN	42
BAB IV PENUTUP	51
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara.
2. Mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara di dalam pelaksanaan

program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan adalah memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 . Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data program dan kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2024 yang telah dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara selama Anggaran Tahun 2024 .

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara selama Tahun 2024 . Capaian kinerja (*performance results*) 2024 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan di identifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara merupakan media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah untuk mengukur, mengevaluasi kinerja serta melakukan analisis dan interpretasi terhadap pencapaian target kinerja Dinas Pendidikan selama anggaran Tahun 2024 .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan Keputusan Kepala LAN nomor 239/IX/6/8/2003. Sedangkan tujuan dari penyusunan LKIP ini adalah:

1. Mengukur, mengevaluasi dan menganalisis kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara selama Tahun 2024 .
2. Meningkatkan akuntabilitas Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara sebagai penanggungjawab urusan bidang pendidikan.
3. Sebagai bahan acuan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang.

C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 12 tahun 2017 Tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara adalah dinas daerah sebagai unsur pembantu Bupati Barito Utara dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana bidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Barito Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.

Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati Barito Utara melaksanakan urusan di

bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan serta pelayanan umum di bidang pendidikan sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Barito Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, adalah terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan BMD;
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 - a. Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Pendidikan Dasar;
 - b. Seksi Kelembagaan & Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar;
4. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

- a. Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
- b. Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
5. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal, terdiri dari:
 - a. Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal;
6. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari:
 - a. Seksi PTK Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal
 - b. Seksi PTK Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Koordinator Wilayah Kecamatan.

E. ISU-ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, antara lain sebagai berikut:

a. Akses

- Masih terdapat anak putus sekolah karena alasan biaya dan non biaya;
- Adanya siswa kota yang sekolah di luar kota;
- Sistem zonasi akan mengurangi capaian APK APM.

b. Mutu

- Belum semua sekolah memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
- Kesenjangan mutu sekolah antara sekolah negeri, dan swasta.
- Kesenjangan kompetensi siswa antar sekolah;
- Kekurangan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan;
- Persebaran pendidik belum proporsional;
- Masih ada pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi;
- Tuntutan kesetaraan mutu lembaga pendidikan non formal;
- Adanya kasus kenakalan pelajar;

c. Tata kelola

- Belum dibentuk SOP dan SPM sebagai acuan pelayanan Pendidikan;
- Tidak konsisten dan benturan antar regulasi pendidikan;
- Masih lemahnya manajemen sekolah;
- Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola sekolah;

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, kedudukan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, permasalahan utama dan sistematika penyajian;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan

anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 yang meliputi, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menguraikan pengukuran kinerja Tahun 2024 , analisis pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 , perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya, perbandingan dengan capaian nasional, hambatan dan antisipasinya dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2024 .

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara 2024 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintah, sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyusunan Laporan Kinerja, wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

A. RENCANA STRATEGIS

Dokumen Perencanaan Strategis Bidang Pendidikan disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bidang Pendidikan guna merumuskan kebijakan di bidang Pendidikan yaitu Pendidikan Dasar dan Luar Biasa, Pendidikan Menengah Kejuruan dan Menengah Tingkat Atas, Pendidikan Luar Sekolah, Pengendalian Mutu dan Kurikulum, merumuskan kebijakan perijinan bidang Pendidikan, memantau dan mengendalikan atas pelaksanaan tugas

pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta melakukan koordinasi sinkronisasi dan integrasi disegala jenjang pendidikan di bidang pendidikan.

Renstra Bidang Pendidikan ini merupakan dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan kedepan yang dijadikan tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang bertujuan terwujudnya Kabupaten Barito Utara yang maju, sejahtera, mandiri, berdaya saing, produktif dan bermartabat dalam lingkungan yang lestari diikuti suasana kehidupan yang demokratis, damai dan berkeadilan serta pemerintahan yang bersih, profesional dan berwibawa, sejalan dengan falsafah hidup “***Iya Mulik Bengkang Turan***”.

Dalam rangka mencapai tujuan di atas, Renstra Bidang Pendidikan Kabupaten Barito Utara menjelaskan kondisi umum tujuan dan sasaran strategis pembangunan serta arah kebijaksanaan dan program-program pembangunan yang ada di daerah yang erat kaitannya dengan bidang pendidikan pada khususnya baik jangka pendek maupun jangka panjang menengah selama lima tahun kedepan.

Renstra adalah rencana strategis pembangunan Kabupaten Barito Utara yang merupakan pernyataan kehendak bersama masyarakat di Kabupaten Barito Utara mengenai strategis pencapaian misi, visi pembangunan daerah.

Renstra Bidang Pendidikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan dokumen pembangunan daerah, dan disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah (eksekutif) dan badan legislatif daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan daerah

yang akan dibiayai dari APBD khusus untuk bidang pendidikan. Merupakan tolak ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Kepala Daerah.

Secara garis besar Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2018 – 2024 dalam suatu dokumen rencana yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sasaran atau proses untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Bidang Pendidikan di Kabupaten Barito Utara didasarkan pada Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Bidang Pendidikan Kabupaten Barito Utara. Visi dapat dipandang sebagai tujuan pembangunan dan misi merupakan sasaran pembangunan.

Visi

Suatu cara pandang jauh kedepan tentang kemana dan bagaimana suatu instansi/organisasi akan diarahkan agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipasif serta inovatif atau dengan kata lain visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin dicapai atau diwujudkan suatu instansi pemerintah. tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Barito Utara dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global

Karena visi merupakan gambaran menantang maka perangkat daerah perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan mengerahkan segala sumber daya instansi.

Visi Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Barito Utara yaitu “Terwujudnya Percepatan Pembangunan SDM yang Berkualitas, Menguasai IPTEK Melalui Pendidikan yang Bermakna dengan dilandasi Iman dan Taqwa Menuju Masyarakat Barito Utara Yang Lestari dan Sejahtera”.

Misi

Suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dan harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi yang dapat dipandang sebagai sasaran pembangunan yaitu untuk memberdayakan Pendidikan dan IPTEK di semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk melaksanakan misi tersebut, diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Penataan dan pemerataan guru yang efektif dan efisien.
- c. Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Bantuan Siswa Miskin.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan. Tujuan juga bisa digunakan sebagai evaluasi dan pengendalian terhadap misi yang telah disusun. Sementara sasaran merupakan Tolak ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai tujuan, agar arah perencanaan dapat lebih operasional, ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Adapun Tujuan dan Sasaran dari Pembangunan Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dibidang pendidikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan dibidang pendidikan di Kabupaten Barito Utara ditujukan untuk :

- a. Terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu dan terjangkau.
- b. Tersedianya akses infrastruktur pendidikan sampai ke seluruh wilayah Kabupaten.
- c. Terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu dan terjangkau.

Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Barito Utara Barito Utara adalah:

- a. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Penataan dan pemerataan guru yang efektif dan efisien.
- c. Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
- d. Tersedianya sarana dan prasarana bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk dapat merealisasikan atau mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas, maka pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta mengidentifikasi kekuatan, peluang, tantangan dan ancaman dalam proses pembangunan pendidikan untuk jangka lima tahun ke depan sehingga memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Dinas Pendidikan Barito Utara.

Kebijakan pembangunan Bidang Pendidikan secara garis besar adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan, meningkatkan mutu dan kesejahteraan tenaga kependidikan, memberdayakan lembaga pendidikan sebagai pusat pemberdayaan nilai, sikap dan kemampuan, melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum dan pelaksanaan desentralisasi pendidikan, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, juga mengembangkan sumber daya sedini mungkin.

Dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan program penelitian, peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan sumber daya IPTEK serta program kemandirian dan keunggulan IPTEK yang bertujuan meningkatkan kemampuan lembaga penelitian dan pengembangan.

Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang bermutu, murah, merata dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, khususnya pendidikan dasar dan menengah, maka dilakukan terobosan dengan beberapa regulasi dan kebijakan strategis. Hal ini dengan harapan agar pemerintah secara konsekuen dapat melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada bagian ke empat hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Dalam rangka percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu di Indonesia melalui kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar.

Guna kesinambungan kebijakan program pendidikan gratis jenjang pendidikan dasar 9 tahun, dimana pada tahun 2009 merupakan keharusan dalam penuntasan pendidikan gratis jenjang pendidikan dasar 9 tahun maka pasca tuntasnya pendidikan dasar 9 tahun akan dilanjutkan dengan kebijakan program wajib belajar 12 tahun jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dimulai pada tahun 2010.

Pada saat ini pendidikan di daerah juga masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menonjol (1) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan; (2) masih rendahnya kualitas

dan relevansi pendidikan; dan (3) masih lemahnya manajemen pendidikan.

Berbagai permasalahan tersebut akan diatasi melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan yang mengacu pada arah kebijakan pendidikan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengupayakan secara bertahap pencapaian upaya pendidikan sampai dengan 20% dari anggaran pembangunan.

Adapun beberapa kebijakan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesejahteraan Pendidik dan tenaga kependidikan didaerah terpencil.
- b. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi Guru.
- c. Pemerataan pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur dan jenjang pendidikan terutama di daerah terpencil .
- d. Penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu didorong untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktifitas penduduk Kabupaten Barito Utara.
- e. Penyediaan sarana pendidik dan tenaga kependidikan berupa ; Rumah Dinas Guru (RDG), Rumah Dinas Kepala Sekolah (RDK), Rumah Penjaga Sekolah (RDPenj.Sek).
- f. Penyediaan gedung Laboratorium, Perputakaan, Kantor dan UKS serta sarana Olah raga.
- g. Peningkatan kesejahteraan Pendidik dan tenaga kependidikan didaerah terpencil.

4. Program

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara telah menyusun program dan kegiatan tahun 2024 – 2026 yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat serta memperhatikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum serta merupakan landasan utama pelaksanaan otonomi daerah pada era reformasi saat ini.

Menyikapi peraturan perundangan diatas terutama pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, dimana ke-2 (dua) peraturan daerah tersebut mengatur kewenangan, tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Barito Utara terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara.

Sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya peraturan daerah tersebut diatas, maka setiap unit kerja diharuskan menyusun

Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026 sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Untuk selanjutnya akan dijabarkan menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan yang berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun.

Dengan maksud agar pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta kegiatan pada Dinas Pendidikan dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan hakekat otonomi daerah yang diembannya, maka telah disusun Rencana Kerja / Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara sebagai implementasi dari Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026 yang akan dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2024 ini, serta menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2024 berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah disusun.

Program dan kegiatan yang ditelah ditetapkan merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu kepada Rencana Kinerja Tahun 2024 serta Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026 yang pada akhirnya ditetapkan sebagai Penetapan Kinerja Tahun 2024 .

TABEL PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini	<ul style="list-style-type: none"> Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 	84,00%
2.	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dasar	<ul style="list-style-type: none"> Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 	90,00%
		<ul style="list-style-type: none"> Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 	88,00%
		<ul style="list-style-type: none"> Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 	76,00%
		<ul style="list-style-type: none"> Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 	59,00%
		<ul style="list-style-type: none"> Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Angka rata-rata Lama Sekolah 	8,5Tahun
3.	Meningkatnya akses pendidikan non formal	<ul style="list-style-type: none"> Angka Melek Huruf 	99.20%
4.	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> Guru yang bersertifikat 	68%

Sebelum DPA Perubahan Tahun 2024**Januari 2024**

Program dan Kegiatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten	Rp. 334,570,822,775	Rp. -	APBD
2. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 253,475,537,925	Rp.168,112,347,010	APBD
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 764,959,700	Rp. 0	APBD
JUMLAH	Rp.405,645,975,600.00	Rp.183,565,344,800	

Sesudah DPA Perubahan Tahun 2024**Desember 2024**

Program dan Kegiatan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten	Rp. 334,570,822,775	Rp. -	APBD
2. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 253,475,537,925	Rp.168,112,347,010	APBD
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 764,959,700	Rp. 0	APBD
JUMLAH	Rp.405,645,975,600.00	Rp.183,565,344,800	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Barito Utara tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan, mulai Perencanaan Strategis (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggung jawaban publik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Berdasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Dalam semangat transparansi seperti itulah, Laporan Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2024 ini disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai pertanggungjawaban administrasi, moral

dan spiritual sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. IKU spesifik dan jelas (*Spesific*)
- b. IKU dapat diukur secara objektif (*Measurabel*)
- c. IKU dapat dicapai (*Achievabel*)
- d. IKU menggambarkan hasil (*Relevance*)
- e. IKU untuk kurun waktu tertentu (*Time Bound*)

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara 2024 – 2026 dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.

**CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini	<ul style="list-style-type: none"> Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 	84,00%	91.23%	108.61%
2.	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dasar	<ul style="list-style-type: none"> Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 	90,00%	84.20%	93.56%
		<ul style="list-style-type: none"> Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 	88,00%	69.59%	79.08%
		<ul style="list-style-type: none"> Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 	76,00%	77.34%	101.76%
		<ul style="list-style-type: none"> Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 	59,00%	57.76%	97.90%
		<ul style="list-style-type: none"> Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A 	100 %	100 %	100 %
		<ul style="list-style-type: none"> Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B 	100 %	100 %	100 %
		<ul style="list-style-type: none"> Angka rata-rata Lama Sekolah 	8,50 Tahun	8,50 Tahun	100%
3.	Meningkatnya akses pendidikan non formal	<ul style="list-style-type: none"> Angka Melek Huruf 	99,20%	99,53 %	100,33%
4.	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> Guru yang bersertifikat 	68,00 %	73.38 %	107.91%

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dengan Indikator Kinerja, Target dan Realisasi :

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

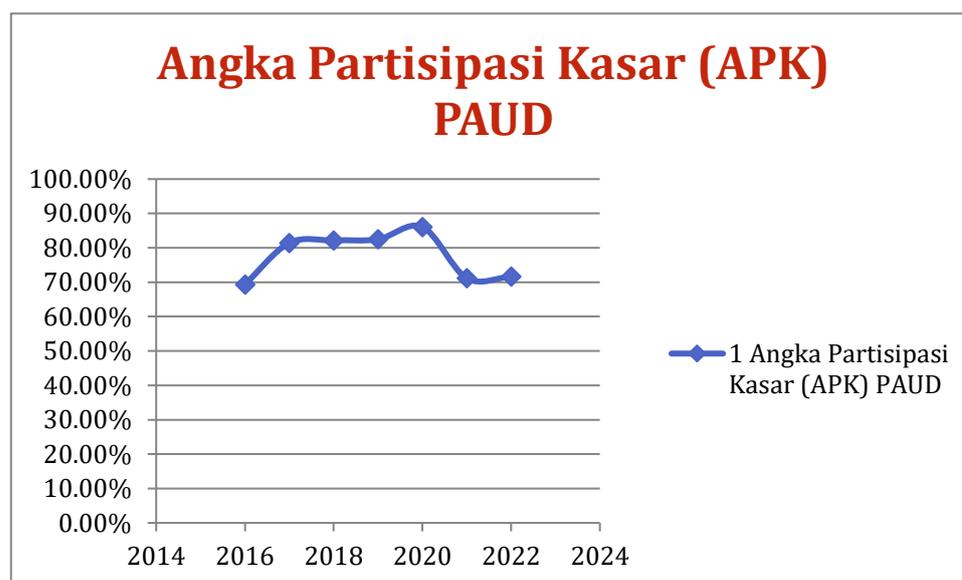
- Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) target **84,00 %** dengan realisasi **91.23%** adalah Jumlah siswa pada jenjang Jumlah Murid TK/RA/KB/TPA/SPS **4782** dibanding Jumlah anak usia 5-6 tahun **5243** x 100% = **108.61 %** untuk persentase capaian kinerja tahun **2024** = **91.23 %**, sedangkan untuk Persentase Capaian Kinerja tahun **2023** = **72.72%**

Tabel 1.a

Data Pendidikan Anak Usia Dini 2018-2024

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	82,17 %	82,47 %	86,05%	71,16%	71,62%	72.72%	91.23

Berikut Diagram Angka Partisipasi Kasar (APK)PAUD



Kalo dilihat dari tabel dan Diagram diatas untuk Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini mengalami peningkatan di tahun 2024 ini sebesar 10.1% .

Faktor yang mempengaruhi Persentase Pencapaian APK PAUD tahun 2024 antara lain :

1. Sudah Stabilitasnya Anggaran Daerah untuk menunjang APK PAUD
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD.
3. Meningkatnya penyaluran dana Bantuan Operasional Paud (BOP) dari tahun ke tahun sehingga bisa meringankan beban orang tua dalam hal biaya sekolah.
4. Sarana dan prasarana penunjang sekolah.
5. Pelayanan PAUD pada setiap Desa sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Daerah Khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara.

2. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dasar dengan Indikator Kinerja, Target dan Realisasi:

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

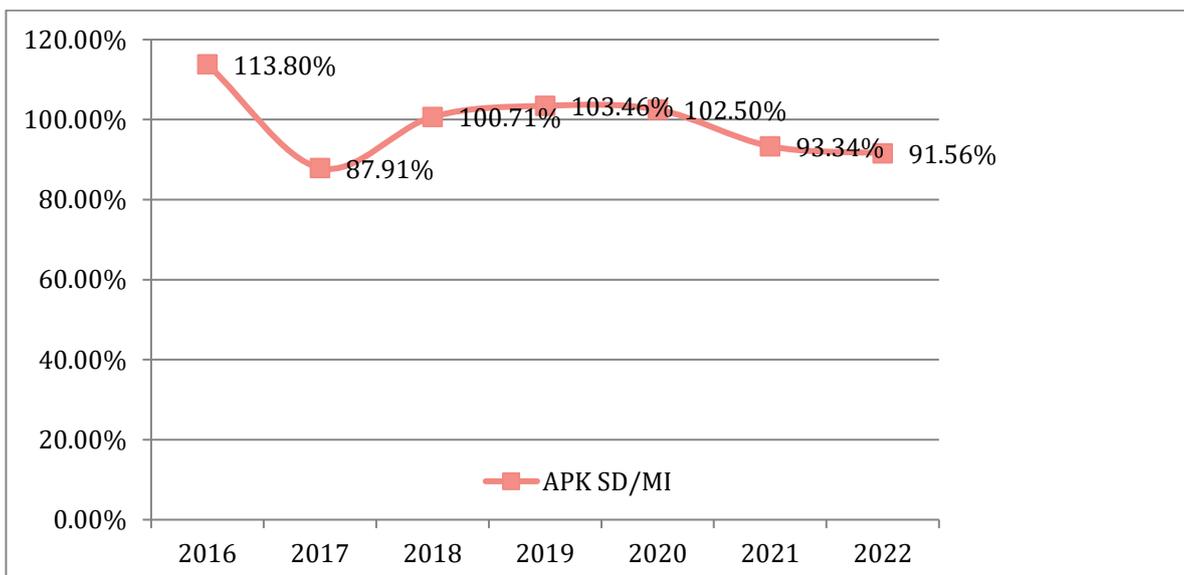
- APK (SD/MI/Paket A) target **90,00%** dengan realisasi **84.20%** adalah Jumlah siswa SD/MI/Paket A **13,744** dibanding Jumlah anak usia 7-12 tahun **16.323** x 100% = **84.20%** untuk persentase capaian kinerja tahun **2024** = **93.56** %, sedangkan untuk Persentase Capaian Kinerja tahun **2023** = **91.52** %.

Tabel 2.a

Data Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 2018-2024

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	APK SD/MI	100,71 %	103,46 %	102,50 %	93,34 %	91,56 %	91,52 %	93,56 %

**Berikut Diagram Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI/Paket A**



b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

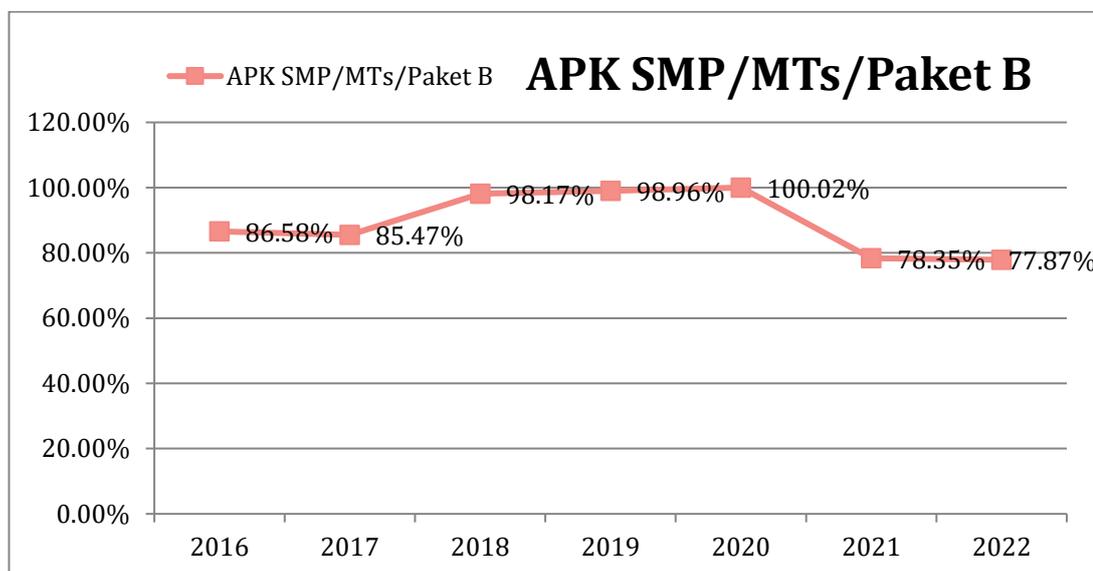
- APK (SMP/MTs/Paket B) target **88,00%** dengan realisasi **69.59%** adalah Jumlah siswa SMP/MTs/Paket B **6018** dibanding Jumlah anak usia 13-15 tahun **8648** x 100% = **69.59%** untuk persentase capaian kinerja tahun **2024** = **79.08** %, sedangkan untuk Persentase Capaian Kinerja tahun **2023** = **76.46** %.

Tabel 2.b

**Data Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B
Tahun 2018-2024**

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	APK SMP/MTs /Paket B	98,17%	98,96%	100,02%	78,35%	77,87%	76,46%	79,08%

**Berikut Diagram Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI/Paket A**



Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) ada Sedikit Penurunan dari tahun 2020 dikarenakan jumlah siswa tingkat dasar dan menengah Belum Meningkat, sedangkan Target RPJMD dan Indikator Kinerja Bertambah, dan kesadaran masyarakat terhadap Pendidikan Kurang meningkat seiring meningkatnya akses jalan dan kondisi Sekolah yang semakin baik belum sepenuhnya di Terapkan di masyarakat pada sektor Pendidikan.

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat Kabupaten Barito Utara tahun 2024 sebesar **84.20 %** tersebut Tergolong baik di tingkat provinsi dan nasional. Sedangkan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat tingkat Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 adalah sebesar **106,64%** dan untuk tingkat Nasional adalah **114,01%**.

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat Kabupaten Barito Utara tahun 2024 sebesar **79.08 %** tersebut masih tergolong baik pada tingkat provinsi dan nasional. Sedangkan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat tingkat Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 adalah sebesar **101,23%** dan untuk tingkat Nasional adalah **106,9%**.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah dengan adanya Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun, dengan Kegiatan :

- Penambahan ruang kelas sekolah
- Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
- Pengadaan mebeluer sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat Bangunan sekolah (DAK)
- Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)
- Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (DAK)
- Penambahan ruang kelas sekolah (DAK)
- Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (DAK)
- Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi (DAK)
- Rehabilitasi/pemeliharaan sarana air bersih dan sanitasi (DAK)

c. Angka Partisipasi Murni (APM) SD+MI+Paket A

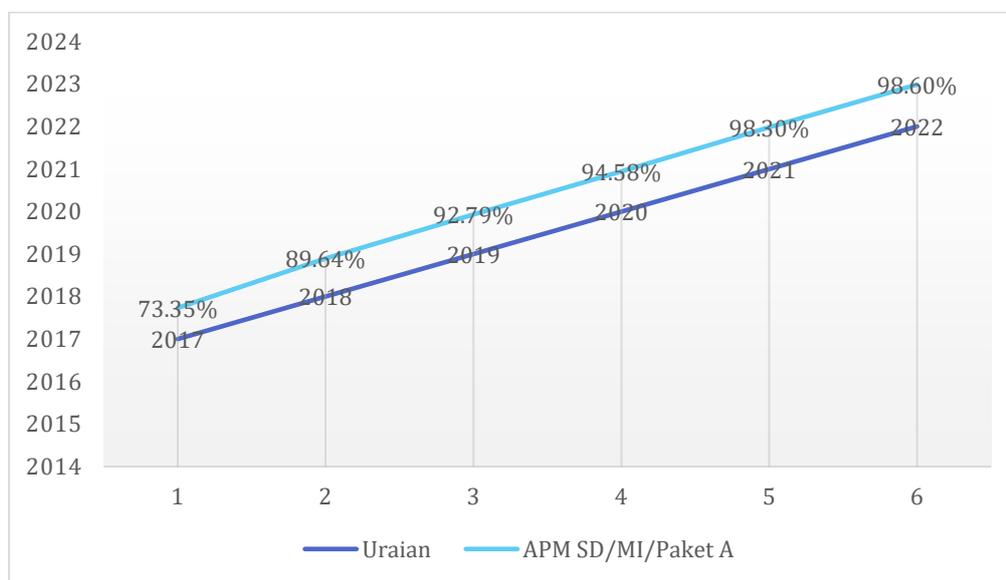
APM (SD+MI+Paket A) target **76.00 %** dengan realisasi **77.34 %** adalah Jumlah Siswa Usia 7-12 tahun

(SD+MI+Paket A) **12625** dibanding Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 tahun **16323** x 100% = **77.34 %** untuk Persentase Capaian Kinerja tahun **2024** = **101.76%**, sedangkan untuk Persentase Capaian Kinerja tahun **2023** = **96.03%**.

Tabel 2.c
Data Angka Partisipasi Murni (APM)
SD+MI+Paket A tahun 2019-2024

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	20243	2024
1	APM SD/MI/Paket A	92,79%	94,58%	98.30 %	98.60%	96.03%	101.76 %

Berikut Diagram Angka Angka Partisipasi Murni (APM)
SD+MI+Paket A tahun 2019-2024



Angka Partisipasi Murni ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sudah mulai tumbuh, dengan adanya program-program penunjang

dari Pemerintah baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah sangat berdampak besar dalam peningkatan APM meskipun belum mendekati atau mencapai nilai idealnya 100 persen.

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat Kabupaten Barito Utara tahun 2024 sebesar **101.76%**. Sedangkan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat tingkat Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 adalah sebesar **94,91%** dan untuk tingkat Nasional adalah **94,8%**.

Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat di Kabupaten Barito Utara adalah:

- a. Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun, dengan Kegiatan :
 - Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Pusat) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP.
 - Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
 - Pelatihan Tim Manajemen BOS dan BOSDA SD/SMP Untuk 9 Kecamatan.
 - Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)

d. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP+MTs+Paket B

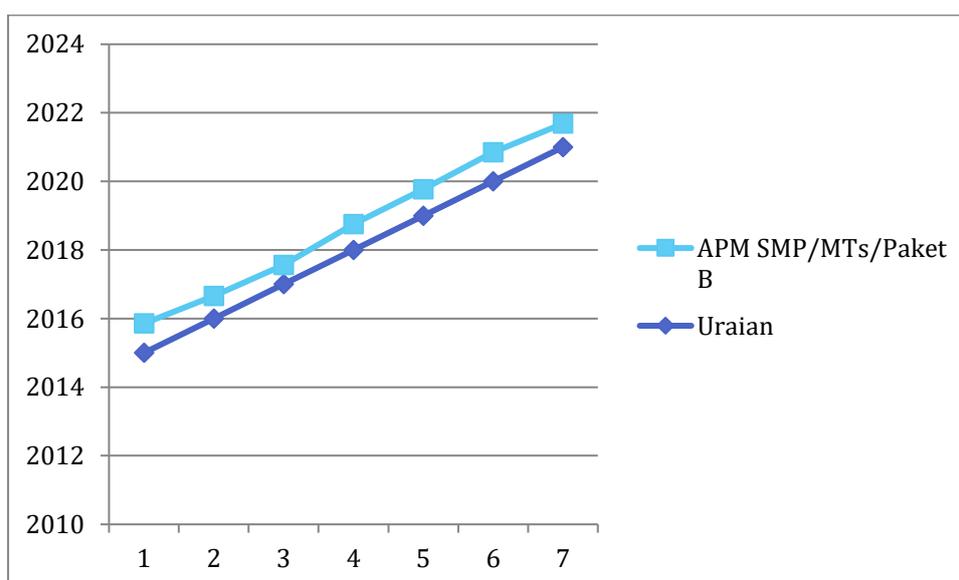
APM (SMP+MTs+SMP Terbuka+Paket B) target **59.00%** dengan realisasi adalah **57.76%** Jumlah Siswa Usia 13-15 tahun (SMP+MTs+SMP Terbuka+Paket B) **4995** dibanding Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 tahun **8648** x 100%

= **57.76%**, Persentase Capaian Kinerja tahun **2024** = **97.90%**, sedangkan untuk Persentase Capaian Kinerja tahun **2023** = **112.81** % .

Tabel 2.d
Data Angka Partisipasi Murni
SMP+MTs+SMP Terbuka+Paket B
Tahun 2018-2024

NO	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	APM SMP/MTs/Paket B	76,82%	84,66%	88,64%	91.02%	112.81%	97.90%

Berikut Diagram Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP+MTs+SMP Terbuka+Paket B
Tahun 2017-2024



Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat Kabupaten Barito Utara tahun 2024 sebesar **97.90** % dan menunjukkan kenaikan mulai tahun 2017 dan mengalami kenaikan secara signifikan pada tahun 2021 itu menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam bidang Pendidikan seiring dengan perbaikan demi perbaikan kualitas bangunan serta proses belajar mengajar di sekolah khususnya sarana dan prasarana dan kualitas pendidik.

Capaian APM SMP Sederajat Kabupaten Barito Utara tersebut lebih baik daripada tingkat provinsi dan nasional. Sedangkan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat tingkat Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 adalah sebesar 73,45% dan untuk tingkat Nasional adalah 82,02%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Barito Utara adalah: Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun, dengan Kegiatan :

- Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS Pusat) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP.
- Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
- Pelatihan Tim Manajemen BOS dan BOSDA SD/SMP Untuk 9 Kecamatan.
- Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)

e. Angka Lulusan

Salah satu variabel dari komponen perhitungan angka lulusan adalah jumlah lulusan SD/MI, SMP/MTs dibagi dengan jumlah peserta Ujian Nasional (UN) pada tahun dimana kegiatan UN tersebut diselenggarakan. Berikut adalah data target dan capaian Angka Lulusan tahun **2022**.

- Angka Kelulusan (AL) SD/MI

AL SD/MI dengan target **100%** atau **(2288 dibanding 2324)**, realisasinya adalah = Jumlah Lulusan pada jenjang SD/MI **(2288)** dibanding Jumlah siswa tingkat tertinggi

(jumlah Peserta ANBK) pada jenjang SD/MI (**2024**) x 100% = **98.45 %**. Persentase Capaian Kinerja tahun **2024** = **98.45%**, sedangkan untuk Persentase Capaian Kinerja tahun **2022** = **96.85%**.

- **Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs**

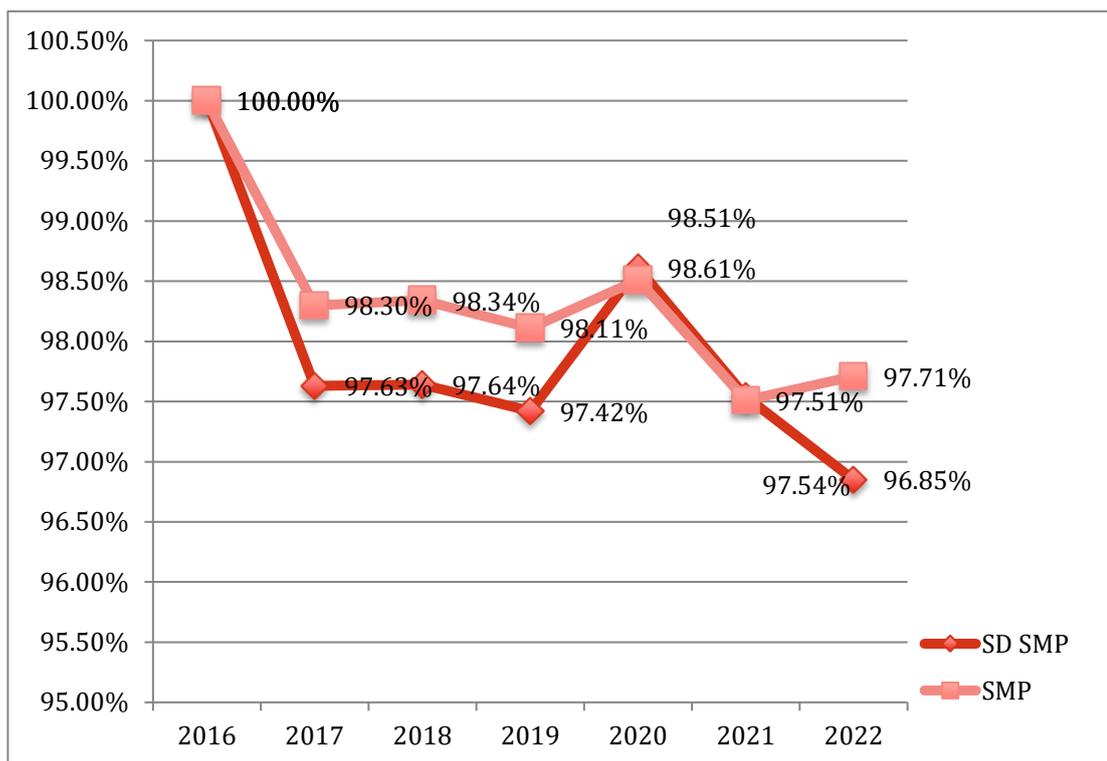
AL SMP/MTs dengan target **100 %** atau (**1877 dibanding 1877**), realisasinya adalah = Jumlah Lulusan pada jenjang SMP/MTs (**1877**) dibanding Jumlah siswa tingkat tertinggi (jumlah Peserta ANBK) pada jenjang SMP/MTs (**1877**) x 100% = **100 %**, Persentase Capaian Kinerja tahun **2024** = **100%**, sedangkan untuk Persentase Capaian Kinerja tahun **2023** = **97,96%**.

Tabel 2.e

Data Angka Kelulusan (AL)

Tahun 2018-2024

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	AL (SD+MI)	97,64%	97,42%	98,61%	98,70%	96,85%	98.45%	100
2	AL (SMP+MTs)	98,34%	98,11%	98,51%	97,51%	97,71%	97,96%	100



Kalo kita amati dari tabel dan diagram diatas maka kita akan melihat capaian Angka Kelulusan pada tahun 2016 adalah sebesar 100% yang berarti target pada tahun tersebut tercapai, sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 Angka Kelulusan baik SD, SMP Sederajat menunjukkan angka penurunan dari target yang sudah ditentukan yaitu 100% .

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan capaian target Angka Kelulusan di Kabupaten Barito Utara :

- Calon peserta Ujian Nasional mengundurkan diri atau putus sekolah padahal sudah terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional
- Angka Kelulusan tidak 100% lulus.

f. Rata – Rata Lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen pembangunan manusia yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indikator ini menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh penduduk. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Tahun **2024** ditargetkan rata-rata lama sekolah Kabupaten Barito Utara sebesar **8,50** tahun dan mampu terealisasi **8.50** tahun. dengan capaian kinerja **100%** atau dalam kategori baik. Angka rata- rata lama sekolah tahun 2024 mengalami perubahan dengan tahun 2020 yaitu 8,5 tahun.

Tabel 2.f.1
Perbandingan jumlah penduduk ≥15 Tahun berdasarkan Pendidikan tertinggi Tahun 2019-2023

NO.	PENDIDIKAN TERTINGGI	JUMLAH PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tidak punya Ijazah SD	13.866	23.034	26.426	25.641	24.876
2	SD	31.693	32.782	35.982	35.089	34.270
3	SMP	22.664	23.034	24.442	24.288	23.916
4	SMA	37.364	35.459	25.060	25.767	26.109
5	Diploma I/II	1.415	1.423	1.200	951	916
6	Diploma III	2.326	2.346	2.025	2.087	2.137
7	S1	5.024	5.217	5.624	5.858	6.189
8	S2	378	392	282	290	296
9	S3	5	5	4	4	4
JUMLAH		114.947	114.735	123.692	121.045	118.713

Dalam periode 2018-2021, angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Barito Utara cenderung mengalami peningkatan. Di Tahun 2024 terjadi Peningkatan 5.17% di tahun Tersebut

Tabel 2.f.2**Data rata-rata lama sekolah 2015-2021**

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024
1	Rata-rata Lama Sekolah	8,43	8,35	8,57	8,57	8,58	8.58	7.41	8.50

Target pada Rata-rata Sekolah di tahun **2024** Belum mencapai target yang ditentukan, namun ada beberapa saran dan Masukan dalam tercapainya target di tahun tersebut adalah:

- 1) Sarana dan prasarana pendidikan belum semuanya lengkap.
- 2) Kondisi Geografis Barito Utara yang sangat luas dan belum semua terhubung dengan akses jalan darat sehingga menyulitkan anak-anak pedalaman untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
- 3) Kurangnya dorongan orang tua untuk menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi.

Solusi untuk kendala di atas antara lain:

- 1) Secara bertahap membangun dan merehabilitasi sarana prasarana pendidikan di setiap sekolah sesuai jenjang yang menjadi kewenangan kabupaten.
- 2) Berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan tingkat menengah yang menjadi kewenangan provinsi.

- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi pendidikan kepada masyarakat.
- 4) Mendorong pemerintah membangun transportasi jalan dan jembatan serta penyediaan sarana transportasi umum agar memudahkan akses menuju dan dari satuan pendidikan di daerah pedalaman.

3. Meningkatnya akses pendidikan non formal

Angka melek huruf adalah indikator dasar yang dicapai oleh daerah karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Angka Melek Huruf Pemerintah Kabupaten Barito Utara tahun **2024** target **99,60 %** dengan realisasi **99,53 %** adalah Jumlah penduduk di usia > 15 tahun yang melek huruf **121,417** dibanding jumlah penduduk usia > 15 tahun **121,988 x 100% = 99.53%**, Capaian **99.93%** dengan kategori Baik.

Target pada tahun 2024 sudah dimaksimalkan dengan tercapainya Target tersebut, namun pada penduduk usia > 15 tahun masih ada yang buta huruf antara lain disebabkan masih adanya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan tingkat gengsi yang masih tinggi sehingga untuk memenuhi pendidikan penyelesaian Buta aksara terabaikan, serta kurangnya motivasi untuk mengikuti paket A dan B masih sangat rendah, terutama yang berdomisili pada pedalaman atau perkampungan yang jauh selain itu faktor pekerjaan atau mata pencarian seperti pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan.

Solusinya dengan melakukan pendekatan – pendekatan secara instensif terhadap masyarakat yang masih belum memahami akan pentingnya pendidikan, sehingga tidak ketinggalan dengan masyarakat akan tentang pendidikan, mengadakan sosialisasi di daerah untuk memotivasi penduduk bahwa membaca manusia dapat meningkatkan kualitas dirinya, yang berujung pada tingginya intelektualitas seseorang. Dalam hal ini pemerintah meningkatkan pembinaan kepada lembaga non formal untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikannya untuk memberantas buta aksara.

Program dan kegiatan yang mendukung untuk menuntaskan kebutaaksaraan:

- a. Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun, dengan Kegiatan:
 - Penyelenggaraan Paket A setara SD
 - Penyelenggaraan Paket B setara SMP
 - Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan B
- b. Program Pendidikan Non Formal, dengan Kegiatan:
 - Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
 - Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
 - Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - Konsultasi/Koordinasi Program PNF ke Provinsi
 - Seleksi dan Pengiriman Jambore PTK, PNF
 - Penyediaan Rapot Paket A dan B
 - Pembinaan Program PNFI

4. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

a. Guru yang bersertifikat

Guru yang bersertifikat target **68,00%** dengan realisasi **73.38 %** adalah Jumlah guru yang memiliki sertifikat profesi **2652** dibanding Jumlah Guru TK, SD dan SMP **3614** x 100 % = **73.38 %** dengan capaian **107.91 %**.

Tabel 4.a

Jumlah guru jenjang PAUD, SD dan SMP yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik dan Jumlah guru PAUD, SD dan SMP Kabupaten Barito Utara Tahun **2024**

N O	KECAMATAN	Jumlah Guru/Orang Sertifikasi	Pendidikan Dasar				Ket
			Guru PPG	PAUD	SD	SMP	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GUNUNG PUREI	82	41	7	58	17	
2	GUNUNG TIMANG	296		28	206	62	
3	MONTALLAT	213		11	152	50	
4	LAHEI	256		21	192	43	
5	LAHEI BARAT	218		15	151	52	
6	TEWEH SELATAN	259		35	156	68	
7	TEWEH BARU	402		28	267	107	
8	TEWEH TENGAH	781		151	436	194	
9	TEWEH TIMUR	145		7	109	29	
	TOTAL	2652	41	303	1727	633	

Data : Dapodikdasmen semester ganjil 2022/2024

Banyak faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaiannya target guru yang bersertifikat pendidikan antara lain masih banyaknya pendidik berstatus Guru Tidak Tetap (GTT) di sekolah Negeri yang tidak dimungkinkan untuk bisa mendapatkan Sertifikat Pendidik,

b. Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar

Rasio guru terhadap murid SD/MI+ SMP/MTs target **0,08%** dengan realisasi **0.12%** adalah Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs) **2451** dibanding Jumlah Murid

(SD/MI+SMP/MTs) **19,685 x 100% = 0.12 %** Capaian **0.67 %** lebih tinggi dari target capaian yaitu 0,08 artinya rasio guru terhadap murid SD/MI adalah 1 guru dibanding dengan 11 murid. Karena Idealnya Rasio Guru Terhadap Murid adalah 1 Guru di banding dengan 18 Murid.

c. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV target **88,00 %** dengan realisasi **71.26%** adalah

Jumlah guru yang sudah S1/D-IV **2418** dibanding jumlah semua guru **3393 x 100 % = 84.84%**.

Realisasi tidak lebih tinggi dari target capaian yaitu **84.84%**.

Pencapaian kondisi akhir Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2022

- Jumlah lembaga PAUD (TK/KB/TPA/SPS/RA) = **219** unit
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI = **93.56%**
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs = **79.08%**
- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI = **101.76%**
- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs = **97.90%**
- Angka Lulusan SD/MI = **100%** (sebanyak 2288 orang)
- Angka Lulusan SMP/MTs = **100%** (sebanyak 1877 orang)
- Angka Melek Huruf (AMH) = **99.93%** (sebanyak 121.417 orang usia 15 tahun ke atas)
- Jumlah lembaga SD/MI = **177** unit
- Jumlah lembaga SMP/MTs = **42** unit

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Perhitungan Tingkat efisiensi dalam penggunaan Sumber daya Anggaran dapat di lihat dari perbandingan dan pencapaian Kinerja dan Capaian Realisasi Keuangan dari Program dan Kegiatan yang tersusun di atas lalu tersaji pada Tabel dibawah Berikut :

Tabel. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan keuangan dan Tingkat Efisiensi.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja 2024	Keuangan			Tingkat Efisiensi
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	$\frac{6}{5} \times 100 = (7)$	4-7=(8)
1.	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini	<ul style="list-style-type: none"> Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 	108.61 %	33,442,537,675	31,987,294,159	95.65	12.96
2.	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dasar	<ul style="list-style-type: none"> Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A 	93.56%	13,389,248,150	13,240,626,850	98.88	-4.48
		<ul style="list-style-type: none"> Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B 	79.08%	29,538,142,350	28,478,187,920	96.41%	-17.33
		<ul style="list-style-type: none"> Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 	101.76 %	9,393,826,850	9,109,567,235	96.97	4.79
		<ul style="list-style-type: none"> Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 	97.90%	5,927,682,650	5,837,286,755	98.47	-1.12
		<ul style="list-style-type: none"> Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A 	100%	165,000,000	128,049,650	77.61	23
		<ul style="list-style-type: none"> Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B 	100%	80,000,000	40,707,781	50.88	49
		<ul style="list-style-type: none"> Angka rata-rata Lama Sekolah 	97.70%	292,269,250	184,793,754	63.22	-11.26
3.	Meningkatnya akses pendidikan non formal	<ul style="list-style-type: none"> Angka Melek Huruf 	99.93%	1,486,630,000	1,360,563,359	91.51	1.89
4.	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> Guru yang bersertifikat 	107.91 %	764,959,700	729,955,387	96.00	11.00

B. REALISASI ANGGARAN

Besarnya alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 sebesar Rp. 589,211,320,400.00,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 405,645,975,600.00,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 183,565,344,800.00,-

Dari alokasi anggaran tersebut realisasi keuangannya adalah sebesar Rp. 517,461,329,941.00,- (87.82%) terdiri dari realisasi belanja Operasi sebesar Rp. 344,145,598,510.00,- (84,84%) dan belanja Modal sebesar Rp. 173,315,731,431.00,- (94.42%).

Adapun realisasi anggaran untuk kegiatan prioritas sebagai berikut:

No	Program	Anggaran 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian 2022	Anggaran 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian 2023	Anggaran 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian 2024
1.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	41.204.977.775	37.973.957.519	92,16	99,432,109,000	89,851,226,129	90.36	253,475,537,925	227,125,356,378	89.60
2.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	332.499.000	332.380.900	99.96	299,580,750	48,481,250	16.18%	299,580,750	48,481,250	16.18%
3.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	11.351.153.000	9.846.055.371	86,74	21,745,385,750	20,914,369,856	96.18	33,442,537,675	31,987,294,159	95.65
4.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Program Pendidikan Non Formal	1.541.666.000	1.507.604.400	97.79	1,486,630,000	1,360,563,359	91.52	1,916,949,900	1,550,944,650	80.91

**REALISASI KEUANGAN DAN FISIK
APBD TAHUN 2024 DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO UTARA
KEADAAN TAHUN 2024**

No	NOMO R DPA	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL				REALISASI APBD		
				PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)
					Rp	(%)			Rp	(%)		Rp	(%)	
	1	2	3=4+8+12+16	4	5	6=5/4 *100	7	8	9	10=9/8 *100	11		21=20/3*100	22
1	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	441,061,950	441,061,950.00	433,090,200.00	98.19	100.00	-	-	0.00	0.00	433,090,200	98.19	100.00
	1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22,880,500	22,880,500.00	22,854,000.00	99.88	100.00	-	-	-	-	22,854,000	99.88	100.00
	1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	29,250,000	29,250,000.00	29,206,000.00	99.85	100.00	-	-	-	-	29,206,000	99.85	100.00
	1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	22,750,000	22,750,000.00	22,750,000.00	100.00	100.00	-	-	-	-	22,750,000	100.00	100.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

	1.01.01. 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	22,274,750	22,274,750.00	22,149,000.00	99.44	100.0 0	-	-	-	-	22,149,000	99.44	100.00
	1.01.01. 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	25,930,950	25,930,950.00	25,797,500.00	99.49	100.0 0	-	-	-	-	25,797,500	99.49	100.00
	1.01.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,422,500	15,422,500.00	15,386,500.00	99.77	100.0 0	-	-	-	-	15,386,500	99.77	100.00
	1.01.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	302,553,250	302,553,250.00	294,947,200.00	97.49	100.0 0	-	-	-	-	294,947,200	97.49	100.00
2	1.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	309,384,795,1 74	309,384,795,174.0 0	266,818,949,788. 00	86.24	95.43	-	-	0.00	0.00	266,818,949,7 88	86.24	95.43
	1.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	307,507,206,6 74	307,507,206,674	265,197,851,063. 00	86.24	87.00	-	-	-	-	265,197,851,0 63	86.24	87.00
	1.01.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	357,706,500	357,706,500	356,898,725.00	99.77	100.0 0	-	-	-	-	356,898,725	99.77	100.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

	1.01.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,319,574,000	1,319,574,000	1,064,478,000.00	80.67	81.00						1,064,478,000	80.67	81.00
	1.01.01. 2.02.04	Kordinasi Dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	150,000,000	150,000,000	149,527,000.00	99.68	100.00	-	-	-	-	-	149,527,000	99.68	100.00
	1.01.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21,998,500	21,998,500	21,938,000.00	99.72	100.00	-	-	-	-	-	21,938,000	99.72	100.00
	1.01.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14,297,000	14,297,000	14,245,000.00	99.64	100.00	-	-	-	-	-	14,245,000	99.64	100.00
	1.01.01. 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	14,012,500	14,012,500	14,012,000.00	100.00	100.00						14,012,000	100.00	100.00
3	1.01.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	496,800,000	496,800,000	370,410,400	74.56	85.50	-	-	0.00	0.00		370,410,400	74.56	85.50

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

	1.01.01. 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	432,000,000	432,000,000	306,274,200.00	70.90	71.00	-	-	-	-	306,274,200	70.90	71.00
	1.01.01. 2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	64,800,000	64,800,000	64,136,200.00	98.98	100.0 0	-	-	-	-	64,136,200	98.98	100.00
4	1.01.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,317,120,000	1,317,120,000	1,294,975,332.00	98.32	100.0 0	-	-	0.00	0.00	1,294,975,332	98.32	100.00
	1.01.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	374,880,000	374,880,000	372,000,000.00	99.23	100.0 0	-	-	-	-	372,000,000	99.23	100.00
	1.01.01. 2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	72,840,000	72,840,000	71,053,200.00	97.55	100.0 0	-	-	-	-	71,053,200	97.55	100.00
	1.01.01. 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	356,400,000	356,400,000	354,464,819.00	99.46	100.0 0	-	-	-	-	354,464,819	99.46	100.00
	1.01.01. 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	513,000,000	513,000,000	497,457,313.00	96.97	100.0 0	-	-	-	-	497,457,313	96.97	100.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

5	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,938,129,650	2,109,892,750.00	2,092,064,316.00	99.16	97.00	828,236,900.00	438,765,000.00	52.98	100.00	2,530,829,316	86.14	90.29
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	410,777,600	23,435,000	22,399,000.00	95.58	100.00	387,342,600.00	-	-	-	22,399,000	5.45	50.00
	1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	440,894,300	-	-	-	-	440,894,300	438,765,000.00	99.52	100.00	438,765,000	99.52	100.00
	1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,958,750	100,958,750	100,474,250.00	99.52	100	-	-	-	-	100,474,250	99.52	100.00
	1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	82,590,000	82,590,000	67,530,000.00	81.77	82.00	-	-	-	-	67,530,000	81.77	82.00
	1.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	175,444,000	175,444,000	175,203,500.00	99.86	100.00	-	-	-	-	175,203,500	99.86	100.00
	1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,625,000,000	1,625,000,000	1,624,457,868.00	99.97	100.00	-	-	-	-	1,624,457,868	99.97	100.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

	1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	102,465,000	102,465,000	101,999,698.00	99.55	100.00	-	-	-	-	101,999,698	99.55	100.00
6	1.01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10,873,228,000	-	-	-	-	10,873,228,000	10,389,427,000	95.55	99	10,389,427,000	95.55	99.17
	1.01.01.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5,960,810,000	-				5,960,810,000.00	5,570,323,000.00	93.45	95.00	5,570,323,000	93.45	95.00
	1.01.01.07.05	Pengadaan Mebel	342,018,000	-	0.00	-	-	342,018,000.00	340,085,000.00	99.43	100.00	340,085,000	99.43	100.00
	1.01.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66,650,000	-				66,650,000.00	65,110,000.00	97.69	100.00	65,110,000	97.69	100.00
	1.01.01.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	2,603,750,000					2,603,750,000.00	2,561,255,000.00	98.37	100.00	2,561,255,000		100.00
	1.01.01.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,300,000,000	-				1,300,000,000.00	1,277,760,000.00	98.29	100.00	1,277,760,000	98.29	100.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

	1.01.01.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600,000,000	-				600,000,000.00	574,894,000.00	95.82	100.00	574,894,000	95.82	100.00
7	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,458,088,001	4,458,088,001.00	3,920,533,833.00	87.94	89.8	-	-	0.00	0.00	3,920,533,833	87.94	89.75
	1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	271,009,000	271,009,000	270,987,500.00	99.99	100.00			-	-	270,987,500	99.99	100.00
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	652,250,251	652,250,251	425,703,583.00	65.27	67.00	-	-	-	-	425,703,583	65.27	67.00
	1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88,908,750	88,908,750	88,792,750.00	99.87	100.00					88,792,750	99.87	100.00
	1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,445,920,000	3,445,920,000	3,135,050,000.00	90.98	92.00					3,135,050,000	90.98	92.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

8	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,661,600,000	1,007,600,000	706,977,580.00	70.16	64.67	3,654,000,000.00	2,819,669,000.00	77.17	85.50	3,526,646,580	75.65	79.38
	1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	707,600,000	707,600,000	657,077,580.00	92.86	94.00	-	-	-	-	657,077,580	92.86	94.00
	1.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50,000,000	50,000,000	49,900,000.00	99.80	100.00	-	-	-	-	49,900,000	99.80	100.00
	1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3,132,000,000	-	0.00	-	-	3,132,000,000.00	2,332,342,000.00	74.47	76.00	2,332,342,000	74.47	76.00
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	772,000,000	250,000,000	0.00	-	-	522,000,000.00	487,327,000.00	93.36	95.00	487,327,000	63.13	47.50

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

9	1.01.01.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	127,900,605,900	25,717,403,550.00	16,166,534,544.00	62.86	92.36	102,183,202,350.00	97,331,291,470.00	95.25	95.06	113,497,826,014	88.74	91.42
	1.01.02.2.01.03	Penambahan Ruang Guru/kepala sekolah/TU	3,600,000,000	-	-	-	-	3,600,000,000	3,543,947,673	98.44	100.00	3,543,947,673	98.44	100.00
	1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1,800,000,000	-	-	-	-	1,800,000,000	1,768,563,101	98.25	100.00	1,768,563,101	98.25	100.00
	1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1,772,085,350	-	-	-	-	1,772,085,350	1,725,771,482	97.39	100.00	1,725,771,482	97.39	50.00
	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	13,519,824,650	319,824,650	305,709,066	95.59	100.00	13,200,000,000	13,033,408,117	98.74	100.00	13,339,117,183	98.66	100.00
	1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	2,250,000,000	-	-	-	-	2,250,000,000	2,207,981,788	98.13	100.00	2,207,981,788	98.13	100.00
	1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3,341,000,000	200,000,000	195,216,667.00	97.61	100.00	3,141,000,000	2,961,195,258	94.28	96.00	3,156,411,925	94.48	98.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

1.01.02. 2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekola	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	98,744,000	98.74	100.00	98,744,000	98.74	100.00
1.01.02. 2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1,225,000,000	-	-	-	-	1,225,000,000	1,175,354,239	95.95	100.00	1,175,354,239	95.95	100.00
1.01.02. 2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	6,950,000,000	-	-	-	-	6,950,000,000	6,827,268,104	98.23	100.00	6,827,268,104	98.23	100.00
1.01.02. 2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	7,700,000,000	50,000,000	49,950,000	99.90	100.00	7,650,000,000	6,247,500,000.00	81.67	85.00	6,297,450,000	81.79	92.50
1.01.02. 2.01.15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	300,000,000	200,000,000	198,800,000	99.40	100.00	100,000,000	99,950,000.00	99.95	100.00	298,750,000	99.58	100.00
1.01.02. 2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	250,000,000	250,000,000	249,513,000	99.81	100.00	-	-	-	-	249,513,000	99.81	100.00
1.01.02. 2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	140,000,000	140,000,000	134,021,124	95.73	98.00	-	0	-	-	134,021,124	95.73	98.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

1.01.02. 2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5,335,000,000	650,000,000	649,135,780.00	99.87	100.0 0	4,685,000,000	4,660,947,600.00	99.49	100.00	5,310,083,380	99.53	100.00
1.01.02. 2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	300,000,000	300,000,000	243,670,700.00	81.22	84.00	-	-			243,670,700	81.22	84.00
1.01.02. 2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6,402,960,000	6,402,960,000	5,756,160,000.00	89.90	90.00	-	-			5,756,160,000	89.90	90.00
1.01.02. 2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	912,414,400	912,414,400	785,988,768.00	86.14	90.00	-	-	-	-	785,988,768	86.14	90.00
1.01.02. 2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	130,000,000	130,000,000	115,646,767.00	88.96	90.00	-	-			115,646,767	88.96	90.00
1.01.02. 2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	13,295,585,00 0	10,541,968,000	1,993,500,000.00	18.91	20.00	2,753,617,000.00	997,125,000.00	36.21	37.00	2,990,625,000	22.49	38.50

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

1.01.02. 2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	350,000,000	350,000,000	320,303,167.00	91.52	93.00	-	-	-	-	320,303,167	91.52	46.50
1.01.02. 2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	5,997,500,000	150,000,000	147,707,500.00	98.47	100.00	5,847,500,000.00	5,714,237,328.00	97.72	100.00	5,861,944,828	97.74	100.00
1.01.02. 2.01.31	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	130,000,000	130,000,000.00	123,227,900	94.79	96.00	-	-	-	-	123,227,900	94.79	96.00
1.01.02. 2.01.36	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	100,000,000	100,000,000.00	97,261,400.00	97.26	100.00	-	-	-	-	97,261,400	97.26	100.00
1.01.02. 2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	378,412,850	378,412,850	375,358,700.00	99.19	100.00					375,358,700	99.19	100.00
1.01.02. 2.01.39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	140,000,000	140,000,000	123,823,100	88.45	90.00					123,823,100	88.45	90.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

	1.01.02. 2.01.47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	11,360,000,000	2,430,000,000	2,399,670,500.00	98.75	100.00	8,930,000,000.00	8,876,421,523.00	99.40	100.00	11,276,092,023	99.26	100.00
	1.01.02. 2.01.48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4,959,000,000					4,959,000,000.00	4,742,671,965.00	95.64	98.00	4,742,671,965	95.64	98.00
	1.01.02. 2.01.49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	386,373,650	386,373,650	374,495,538.00	96.93	99.00					374,495,538	96.93	99.00
	1.01.02. 2.01.50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	100,000,000	100,000,000	80,722,400.00	80.72	82.00					80,722,400	80.72	82.00
	1.01.02. 2.01.51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	34,675,450,000	1,455,450,000.00	1,446,652,467.00	99.40	100.00	33,220,000,000.00	32,650,204,292.00	98.28	100.00	34,096,856,759	98.33	100.00
10	1.01.02. 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	90,215,444,450	31,039,341,000.00	24,505,753,804.00	78.95	91.77	59,176,103,450.00	55,583,537,751.00	93.93	96.00	80,089,291,555	88.78	89.18
	1.01.02. 2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	5,741,500,000	950,000,000	906,799,462.00	95.45	100.00	4,791,500,000.00	4,520,373,138	94.34	100.00	5,427,172,600	94.53	100.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

	1.01.02. 2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2,963,500,000	350,000,000	313,909,000	89.69	91.00	2,613,500,000.00	2,503,790,950	95.80	100.00	2,817,699,950	95.08	95.50
	1.01.02. 2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2,600,000,000	-	-	-	-	2,600,000,000.00	2,315,545,162	89.06	91.00	2,315,545,162	89.06	91.00
	1.01.02. 2.02.06	Pembangunan Laboratorium	6,200,000,000	1,650,000,000	1,624,870,000	98.48	100.0 0	4,550,000,000.00	4,092,606,840	89.95	91.00	5,717,476,840	92.22	95.50
	1.01.02. 2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1,500,000,000	300,000,000	296,059,000	98.69	100.0 0	1,200,000,000.00	1,193,236,184	99.44	100.00	1,489,295,184	99.29	100.00
	1.01.02. 2.02.08	pembangunan Asrama Sekolah	500,000,000	-	-	-	-	500,000,000.00	491,653,000	98.33	100.00	491,653,000	98.33	100.00
	1.01.02. 2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	5,350,000,000	600,000,000	519,269,931.00	86.54	90.00	4,750,000,000.00	4,702,538,042	99.00	100.00	5,221,807,973	97.60	95.00
	1.01.02. 2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	14,648,134,55 0	5,018,134,550	4,748,043,550.00	94.62	96.00	9,630,000,000.00	9,104,658,723	94.54	98.00	13,852,702,27 3	94.57	97.00
	1.01.02. 2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	11,846,500,00 0	1,000,000,000	989,750,000.00	98.98	100.0 0	10,846,500,000	10,821,832,492	99.77	100.00	11,811,582,49 2	99.71	100.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

1.01.02. 2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	374,550,000						374,550,000.00	371,907,702.00	99.29	100.00	371,907,702	99.29	100.00
1.01.02. 2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1,425,000,000	500,000,000			97.86	100.0 0	925,000,000.00	916,969,676	99.13	100.00	1,406,259,676	98.68	100.00
				489,290,000.00										
1.01.02. 2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1,100,000,000	500,000,000			97.86	100.0 0	600,000,000.00	596,496,490.00	99.42	100.00	1,085,820,490	98.71	100.00
				489,324,000.00										
1.01.02. 2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	400,000,000	-			-	-	400,000,000.00	391,092,000.00	97.77	100.00	391,092,000	97.77	100.00
				-										
1.01.02. 2.02.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1,200,000,000	-			-	-	1,200,000,000.00	1,190,777,949.00	99.23	100.00	1,190,777,949	99.23	100.00
				-										
1.01.02. 2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,647,000,000	-			-	-	2,647,000,000.00	2,625,622,112.00	99.19	100.00	2,625,622,112	99.19	50.00
				0										

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

1.01.02. 2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	4,600,000,000	-	-	-	-	4,600,000,000.00	4,593,892,000.00	99.87	100.00	4,593,892,000	99.87	100.00
1.01.02. 2.02.26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	225,000,000	150,000,000	149,250,000.00	99.50	100.00	75,000,000.00	74,920,000.00	99.89	100.00	224,170,000	99.63	100.00
1.01.02. 2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	400,000,000	400,000,000	399,469,000.00	99.87	100.00	-	-	-	-	399,469,000	99.87	100.00
1.01.02. 2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	975,000,000	500,000,000	498,680,000.00	99.74	100.00	475,000,000.00	470,283,080.00	99.01	100.00	968,963,080	99.38	100.00
1.01.02. 2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	350,000,000	350,000,000	286,685,600.00	81.91	83.00	-	-	-	-	286,685,600	81.91	83.00
1.01.02. 2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3,651,600,000	3,651,600,000	2,415,600,000.00	66.15	68.00	-	-	-	-	2,415,600,000	66.15	34.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

1.01.02. 2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	362,104,750	362,104,750	199,672,058.00	55.14	57.00	-	-	199,672,058	55.14	57.00		
1.01.02. 2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	130,000,000	130,000,000	116,613,200.00	89.70	92.00	-	-	116,613,200	89.70	92.00		
1.01.02. 2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	13,711,860,000	10,958,243,000	6,631,440,000.00	60.52	61.00	2,753,617,000.00	1,209,137,500.00	43.91	44.00	7,840,577,500	57.18	52.50
1.01.02. 2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	300,000,000	300,000,000	263,175,106.00	87.73	90.00					263,175,106	87.73	90.00
1.01.02. 2.02.48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	130,000,000	130,000,000	117,467,400.00	90.36	92.00					117,467,400	90.36	92.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

1.01.02. 2.02.49	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	100,000,000	100,000,000	91.91	93.00	91,914,700.00					91,914,700	91.91	93.00
1.01.02. 2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	239,356,500	239,356,500	97.74	100.00	233,958,568.00					233,958,568	97.74	100.00
1.01.02. 2.02.52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	140,000,000	140,000,000	91.77	93.00	128,476,680.00					128,476,680	91.77	93.00
1.01.02. 2.02.58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	100,000,000	100,000,000	86.17	90.00	86,167,100	-	-	-	-	86,167,100	86.17	45.00
1.01.02. 2.02.59	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4,300,000,000	1,900,000,000	94.59	97.00	1,797,228,900	2,400,000,000.00	2,172,346,919.00	90.51	92.00	3,969,575,819	92.32	94.50
1.01.02. 2.02.60	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	559,902,200	559,902,200	91.74	93.00	513,640,549					513,640,549	91.74	93.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

	1.01.02. 2.02.64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1,444,436,450	200,000,000	199,000,000.00	99.50	100.0 0	1,244,436,450.00	1,223,857,792.00	98.35	100.00	1,422,857,792	98.51	100.00
11	1.01.02. 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	33,442,537,67 5	26,756,963,575.00	25,398,090,099.0 0	94.92	84.22	6,685,574,100.00	6,589,204,060.00	98.56	100.00	31,987,294,15 9	95.65	84.22
	1.01.02. 2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	5,001,798,000	3,361,797,900	3,349,866,431	99.65	100.0 0	1,640,000,100.00	1,636,007,827	99.76	100.00	4,985,874,258	99.68	100.00
	1.01.02. 2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2,600,000,000	1,650,000,000	1,605,746,000	97.32	100.0 0	950,000,000.00	930,972,500.00	98.00	100.00	2,536,718,500	97.57	100.00
	1.01.02. 2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	450,000,000	250,000,000	248,690,400	99.48	100.0 0	200,000,000.00	198,940,800	99.47	100.00	447,631,200	99.47	100.00
	1.01.02. 2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	100,057,500	100,057,500	11,611,000	11.60	12.00					11,611,000	11.60	12.00
	1.01.02. 2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	3,595,000,000	525,000,000	524,487,404	99.90	100.0 0	3,070,000,000.00	3,005,520,000.00	97.90	100.00	3,530,007,404	98.19	100.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

1.01.02. 2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1,481,500	1,481,500	1,119,000	75.53	76.00	-	-	-	-	1,119,000	75.53	76.00
1.01.02. 2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	11,809,320,00 0	11,809,320,000	11,213,320,000	94.95	96.00	-	-	-	-	11,213,320,00 0	94.95	96.00
1.01.02. 2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	310,394,300	310,394,300	302,692,273.00	97.52	100.0 0	-	-	-	-	302,692,273	97.52	100.00
1.01.02. 2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	400,002,000	400,002,000	222,952,702.00	55.74	56.00	-	-	-	-	222,952,702	55.74	56.00
1.01.02. 2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2,716,320,000	2,716,320,000	2,636,703,600.00	97.07	100.0 0	-	-	-	-	2,636,703,600	97.07	100.00
1.01.02. 2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	300,000,075	300,000,075	255,402,000.00	85.13	87.00	-	-	-	-	255,402,000	85.13	87.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

1.01.02. 2.03.25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	218,600,450	218,600,450.00	215,093,185.00	98.40	100.00			-	-	215,093,185	98.40	100.00
1.01.02. 2.03.26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	400,630,100	400,630,100.00	244,107,291.00	60.93	61.00			-	-	244,107,291	60.93	61.00
1.01.02. 2.03.28	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1,425,574,000	1,000,000,000.00	987,958,201	98.80	100.00	425,574,000	422,987,260.00	99.39	100.00	1,410,945,461	98.97	100.00
1.01.02. 2.03.30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3,725,000,000	3,325,000,000.00	3,298,147,367	99.19	100.00	400,000,000	394,775,673.00	98.69	100.00	3,692,923,040	99.14	100.00
1.01.02. 2.03.34	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	100,006,600	100,006,600.00	69,896,300	69.89	70.00			-	-	69,896,300	69.89	70.00
1.01.02. 2.03.37	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	200,672,900	200,672,900.00	130,532,900.00	65.05	67.00			-	-	130,532,900	65.05	67.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

	1.01.02. 2.03.39	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	87,680,250	87,680,250.00	79,764,045.00	90.97	91.00			-	-	79,764,045	90.97	91.00
12	1.01.02. 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,916,949,900	1,751,949,900	1,387,107,500.00	79.18	60.63	165,000,000	163,837,150	99.30	100.00	1,550,944,650	80.91	65.00
	1.01.02. 2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	450,000,000	300,000,000	293,682,000	97.89	100.0 0	150,000,000.00	149,002,000.00	99.33	100.00	442,684,000	98.37	100.00
	1.01.02. 2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	31,999,200	31,999,200	4,146,900.00	12.96	13.00					4,146,900	12.96	13.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

1.01.02. 2.04.12	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	127,008,000	127,008,000	127,008,000.00	100.0 0	100.0 0	-	-	-	-	127,008,000	100.0 0	100.00
1.01.02. 2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	122,408,000	122,408,000	40,688,000.00	33.24	34.00	-	-	-	-	40,688,000	33.24	34.00
1.01.02. 2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	719,520,000	719,520,000	696,530,000.00	96.80	100.0 0	-	-	-	-	696,530,000	96.80	100.00
1.01.02. 2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	200,505,500	200,505,500	154,921,600.00	77.27	78.00	-	-	-	-	154,921,600	77.27	78.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

	1.01.02. 2.04.42	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	150,426,500	150,426,500	40,426,500.00	26.87	30.00					40,426,500	26.87	30.00
	1.01.02. 2.04.45	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000.00	14,835,150.00	98.90	100.00	14,835,150	98.90	100.00
	1.01.02. 2.04.46	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	100,082,700	100,082,700	29,704,500.00	29.68	30.00			-		29,704,500	29.68	30.00
13	1.01.04. 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	764,959,700	764,959,700	729,955,387.00	95.42	48.00	-	-	-	0.00	729,955,387	95.42	96.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

	1.01.04. 2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	764,959,700	764,959,700	729,955,387.00	95.42	96.00					729,955,387	95.42	96.00
	1.01.04. 2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	-	-					-	-	-
14	1.01.06. 2	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	400,000,000	400,000,000	321,155,727.00	80.29	82.00	-	-	-	0.00	321,155,727	80.29	82.00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

	1.01.06. 2.01.06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	400,000,000	400,000,000	321,155,727.00	80.29	82.00	-	-	-	321,155,727	80.29	82.00	
TOTAL			589,211,320,400.00	405,645,975,600.00	344,145,598,510.00	84.84	#REF !	183,565,344,800.00	173,315,731,431.00	94.42	0.00	517,461,329,941.00	87.82	0.00

BAB IV

PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu instrumen yang digunakan setiap instansi pemerintah untuk memenuhi kewajibannya yaitu mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilaksanakannya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah untuk mengukur, mengevaluasi kinerja serta melakukan analisis dan interpretasi terhadap pencapaian target kinerja selama 1 tahun anggaran.

Berdasarkan hasil evaluasi program dan capaian target kinerja pembangunan selama tahun 2024 , Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara telah dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dalam melaksanakan kewenangannya mengelola otonomi daerah bidang pendidikan.

Keberhasilan ini menunjukkan adanya kerjasama yang sinergis antara Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara sebagai penanggungjawab bidang pendidikan, lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, para stake holder pendidikan yang terdiri dari Komite Sekolah, Dewan Pendidikan yang merupakan representasi masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang merupakan obyek dari pelayanan pendidikan.

Dari hasil evaluasi dan analisis kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 ini dapat diketahui beberapa permasalahan yang harus mendapat perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk menanganinya sehingga mutu pendidikan ke depan semakin baik.